

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. PROGRAM

:

CF - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
4. KEGIATAN

:

7985 - Pengelolaan Kerumahtanggaan Dan Kerjasama Parlemen DPD RI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

03 - Biro Persidangan I
04 - Biro Persidangan II

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		40.824.578,0
01.01	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	2	
Total			40.824.578,0

7. RINCIAN KEGIATAN
- A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	AL (Rf
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI</i>										40.8
01.AAH	Peraturan lainnya										3.8
01.AAH.001	Peraturan Internal DPD RI								000 - Bukan Tematik		3
	051 - Penyusunan dan Pembahasan										3
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3
01.AAH.002	Keputusan Badan Kehormatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang Dilakukan oleh Anggota DPD RI								000 - Bukan Tematik		1.7
	051 - Pencegahan dan Penanganan										1.7
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.7
01.AAH.003	Peraturan DPD tentang Tata Tertib/Tata Beracara Badan Kehormatan								000 - Bukan Tematik		1.7

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	AL (Rf
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN DPD TENTANG TATA TERTIB/KODE ETIK/TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN										1.7
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.7
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan										2.0
01.ABA.001	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah								000 - Bukan Tematik		2.0
	051 - Tindak Lanjut Penanganan Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah										1.6
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.6
	052 - Finalisasi Rekomendasi										3

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	AL (Rf)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik										2.9
01.ABC.001	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemda								000 - Bukan Tematik		2.9
	051 - Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemerintah Daerah										2.1
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								2.1
	052 - Finalisasi Rekomendasi										7
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								7

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	AL (Rf)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Penyusunan Laporan Kinerja Hasil Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan/atau IHPS										
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan										13.6
01.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Internal Dewan								000 - Bukan Tematik		13.6
	051 - Persiapan										3
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3
	052 - Pelaksanaan										13.3
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								13.3
	053 - Penyusunan Laporan Kinerja PURT										
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	AL (Rf
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEA	Koordinasi										5.0
01.AEA.001	Laporan Pelaksanaan Tugas Panmus/ Pansus DPD RI								000 - Bukan Tematik		5.0
	051 - Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Panitia Musyawarah DPD RI										3.5
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.5
	052 - Pansus DPD RI										1.5
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.5
01.AEC	Kerja sama										8.7
01.AEC.001	Kesepakatan Antar Parlemen Dan Lembaga Internasional								000 - Bukan Tematik		8.7
	051 - Kerja Sama Bilateral/Multilateral Parlemen										4.1
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								4.1
	052 - Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri										8

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	AL (Rf)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								8
	053 - Penyelenggaraan Penyusunan Materi DPD pada Kegiatan Diplomasi Internasional bersifat Kedaerahan										3.7
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.7
01.BLA	Persidangan Lembaga Legislatif										4.4
01.BLA.001	Sidang Paripurna bersama DPD/DPR								000 - Bukan Tematik		4.4
	051 - Sidang Paripurna Mendengarkan Pidato Nota Keuangan Atau Pidato Kenegaraan Presiden RI										4.4
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								4.4
Total											40.8

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI				40.824.578,0				41.750.703,3	42.699.984,5	43.67
01.AAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		3.895.250,0				3.992.630,3	4.092.445,5	4.15
01.AAH.001	Peraturan Internal DPD RI	1	peraturan		395.250,0	1	1	1	405.131,3	415.259,5	42
01.AAH.001.051	Penyusunan dan Pembahasan	1,0	Peraturan	395.250,0	395.250,0	1,0	1,0	1,0	405.131,3	415.259,5	42
01.AAH.002	Keputusan Badan Kehormatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang Dilakukan oleh Anggota DPD RI	1	Surat Keputusan		1.721.894,0	1	1	1	1.764.941,0	1.809.064,0	1.85
01.AAH.002.051	Pencegahan dan Penanganan	1,0	Peraturan/Keputusan	1.721.894,0	1.721.894,0	1,0	1,0	1,0	1.764.941,0	1.809.064,0	1.85
01.AAH.003	Peraturan DPD tentang Tata Tertib/Tata Beracara Badan Kehormatan	1	peraturan		1.778.106,0	1	1	1	1.822.558,0	1.868.122,0	1.91

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AAH.003.051	EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN DPD TENTANG TATA TERTIB/KODE ETIK/TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN	1,0	Peraturan	1.778.106,0	1.778.106,0	1,0	1,0	1,0	1.822.558,0	1.868.122,0	1.910.000,0
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rekomendasi Kebijakan		2.043.774,0				2.094.867,0	2.147.239,0	2.200.000,0
01.ABA.001	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah	2	Rekomendasi Kebijakan		2.043.774,0	2	2	2	2.094.867,0	2.147.239,0	2.200.000,0
01.ABA.001.051	Tindak Lanjut Penanganan Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah	2,0	Rekomendasi Kebijakan	847.794,0	1.695.588,0	2,0	2,0	2,0	1.737.977,0	1.781.427,0	1.820.000,0
01.ABA.001.052	Finalisasi Rekomendasi	2,0	Rekomendasi Kebijakan	174.093,0	348.186,0	2,0	2,0	2,0	356.890,0	365.812,0	370.000,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		2.956.226,0				3.030.130,0	3.105.883,0	3.180.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.ABC.001	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemda	3	Rekomendasi Kebijakan		2.956.226,0	3	3	3	3.030.130,0	3.105.883,0	3.180.000,0
01.ABC.001.051	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemerintah Daerah	3,0	Rekomendasi Kebijakan	720.449,3	2.161.348,0	3,0	3,0	3,0	2.215.381,0	2.270.766,0	2.320.000,0
01.ABC.001.052	Finalisasi Rekomendasi	3,0	Rekomendasi Kebijakan	240.809,3	722.428,0	3,0	3,0	3,0	740.488,0	759.000,0	770.000,0
01.ABC.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja Hasil Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan/atau IHPS	3,0	Rekomendasi Kebijakan	24.150,0	72.450,0	3,0	3,0	3,0	74.261,0	76.117,0	77.000,0
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Rekomendasi Kebijakan		13.693.768,0				14.036.111,0	14.387.012,0	14.740.000,0
01.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Internal Dewan	4	Rekomendasi Kebijakan		13.693.768,0	5	5	5	14.036.111,0	14.387.012,0	14.740.000,0
01.ABL.001.051	Persiapan	4,0	Rekomendasi Kebijakan	76.447,5	305.790,0	3,0	3,0	3,0	313.434,0	321.269,0	322.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.ABL.001.052	Pelaksanaan	4,0	Rekomendasi Kebijakan	3.337.844,5	13.351.378,0	3,0	3,0	3,0	13.685.162,0	14.027.291,0	14.37
01.ABL.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja PURT	4,0	Rekomendasi Kebijakan	9.150,0	36.600,0	3,0	3,0	3,0	37.515,0	38.452,0	3
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		5.000.000,0				5.125.000,0	5.253.124,0	5.38
01.AEA.001	Laporan Pelaksanaan Tugas Panmus/ Pansus DPD RI	5	kegiatan		5.000.000,0	5	5	5	5.125.000,0	5.253.124,0	5.38
01.AEA.001.051	Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Panitia Musyawarah DPD RI	3,0	Kegiatan	1.166.666,7	3.500.000,0	3,0	3,0	3,0	3.587.500,0	3.677.187,0	3.76
01.AEA.001.052	Pansus DPD RI	2,0	Kegiatan	750.000,0	1.500.000,0	2,0	2,0	2,0	1.537.500,0	1.575.937,0	1.61
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan		8.779.328,0				8.904.328,0	9.032.453,0	9.16
01.AEC.001	Kesepakatan Antar Parlemen Dan Lembaga Internasional	3	Kesepakatan		8.779.328,0	8	8	8	8.904.328,0	9.032.453,0	9.16
01.AEC.001.051	Kerja Sama Bilateral/Multilateral Parlemen	1,0	Kesepakatan	4.196.461,5	4.196.461,5	1,0	1,0	1,0	4.301.373,0	4.408.907,4	4.51
01.AEC.001.052	Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri	2,0	Kesepakatan	401.769,3	803.538,5	2,0	2,0	2,0	823.627,0	844.217,6	86

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2
01.AEC.001.053	Penyelenggaraan Penyusunan Materi DPD pada Kegiatan Diplomasi Internasional bersifat Kedaerahan	12,0	Kesepakatan	314.944,0	3.779.328,0	12,0	12,0	12,0	3.779.328,0	3.779.328,0	3.77
01.BLA	Persidangan Lembaga Legislatif		sidang		4.456.232,0				4.567.637,0	4.681.828,0	4.79
01.BLA.001	Sidang Paripurna bersama DPD/DPR	1	sidang		4.456.232,0	1	1	1	4.567.637,0	4.681.828,0	4.79
01.BLA.001.051	Sidang Paripurna Mendengarkan Pidato Nota Keuangan Atau Pidato Kenegaraan Presiden RI	1,0	Sidang	4.456.232,0	4.456.232,0	1,0	1,0	1,0	4.567.637,0	4.681.828,0	4.79
Total					40.824.578,0	-	-	-	41.750.703,3	42.699.984,5	43.67

C. SUMBER PENDANAAN

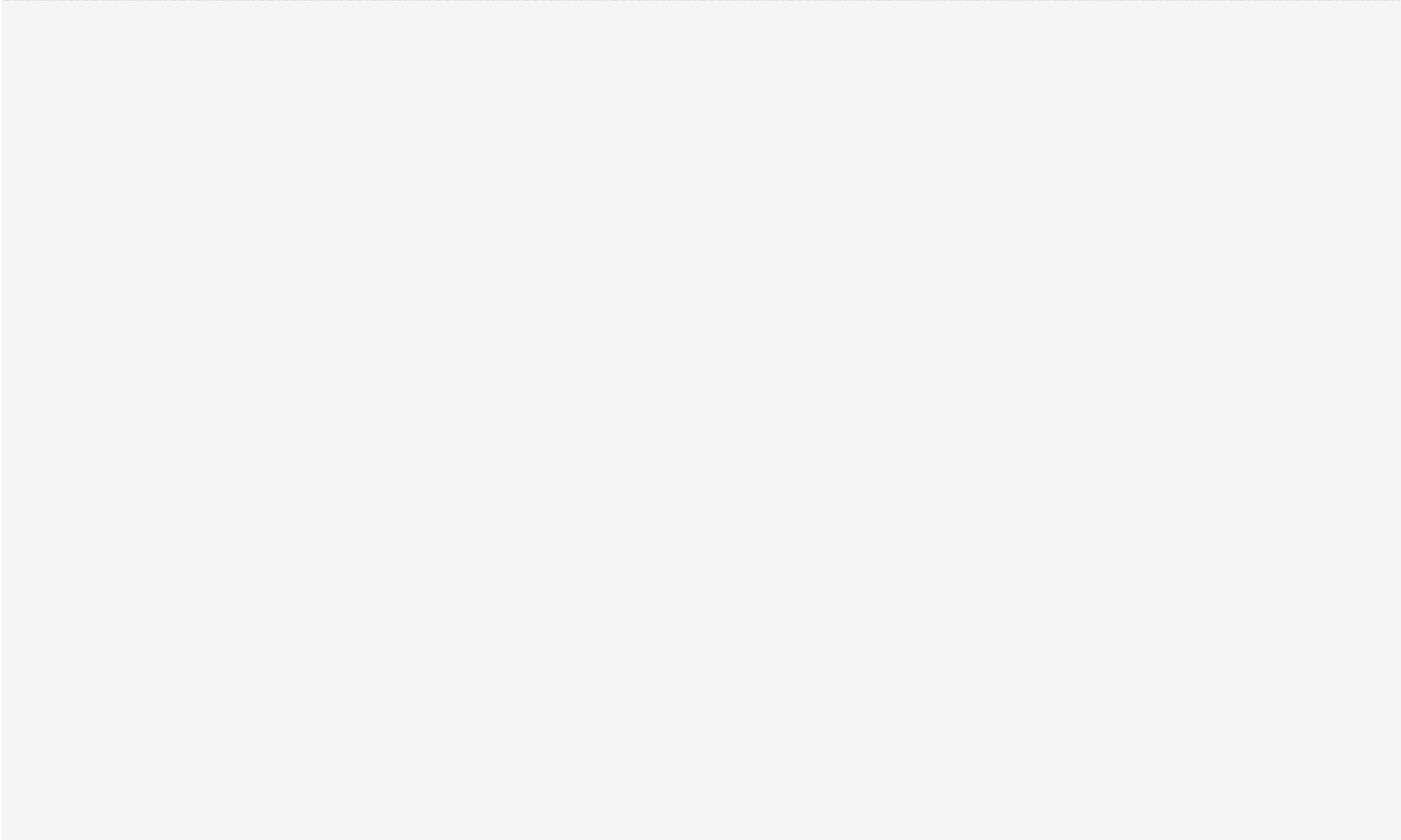
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		40.824.578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.824.578,0
01.AAH	Peraturan lainnya		3.895.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.895.250,0
01.AAH.001	Peraturan Internal DPD RI		395.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AAH.001.051	Penyusunan dan Pembahasan	Utama	395.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395.250,0
01.AAH.002	Keputusan Badan Kehormatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang Dilakukan oleh Anggota DPD RI		1.721.894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.721.894,0
01.AAH.002.051	Pencegahan dan Penanganan	Utama	1.721.894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.721.894,0
01.AAH.003	Peraturan DPD tentang Tata Tertib/Tata Beracara Badan Kehormatan		1.778.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.778.106,0
01.AAH.003.051	EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN DPD TENTANG TATA TERTIB/KODE ETIK/TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN	Utama	1.778.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.778.106,0
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		2.043.774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.043.774,0
01.ABA.001	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah		2.043.774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.043.774,0
01.ABA.001.051	Tindak Lanjut Penanganan Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah	Utama	1.695.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.695.588,0
01.ABA.001.052	Finalisasi Rekomendasi	Utama	348.186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348.186,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik		2.956.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.956.226,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABC.001	Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemda		2.956.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.956.226,0
01.ABC.001.051	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemerintah Daerah	Utama	2.161.348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.161.348,0
01.ABC.001.052	Finalisasi Rekomendasi	Utama	722.428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722.428,0
01.ABC.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja Hasil Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan/atau IHPS	Utama	72.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72.450,0
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		13.693.768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.693.768,0
01.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Internal Dewan		13.693.768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.693.768,0
01.ABL.001.051	Persiapan	Utama	305.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305.790,0
01.ABL.001.052	Pelaksanaan	Utama	13.351.378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.351.378,0
01.ABL.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja PURT	Utama	36.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.600,0
01.AEA	Koordinasi		5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.AEA.001	Laporan Pelaksanaan Tugas Panmus/ Pansus DPD RI		5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.AEA.001.051	Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Panitia Musyawarah DPD RI	Utama	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEA.001.052	Pansus DPD RI	Utama	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.AEC	Kerja sama		8.779.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.779.328,0
01.AEC.001	Kesepakatan Antar Parlemen Dan Lembaga Internasional		8.779.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.779.328,0
01.AEC.001.051	Kerja Sama Bilateral/Multilateral Parlemen	Utama	4.196.461,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.196.461,5
01.AEC.001.052	Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri	Utama	803.538,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803.538,5
01.AEC.001.053	Penyelenggaraan Penyusunan Materi DPD pada Kegiatan Diplomasi Internasional bersifat Kedaerahan	Utama	3.779.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779.328,0
01.BLA	Persidangan Lembaga Legislatif		4.456.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.456.232,0
01.BLA.001	Sidang Paripurna bersama DPD/DPR		4.456.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.456.232,0
01.BLA.001.051	Sidang Paripurna Mendengarkan Pidato Nota Keuangan Atau Pidato Kenegaraan Presiden RI	Utama	4.456.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.456.232,0
Total			40.824.578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.824.578,0

Jakarta, 26 Januari 2026



REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. PROGRAM

:

CF - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
05 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
06 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
4. KEGIATAN

:

7984 - Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPD RI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

03 - Biro Persidangan I
04 - Biro Persidangan II
06 - Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
08 - Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Tersusunnya tabulasi data asmasda untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang		1.440.402,0
01.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	0,20	
02	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang		7.793.363,0
02.01	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	0,4	
03	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah		43.826.143,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.01	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	2,2	
04	Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pemantauan dan peninjauan		927.801,0
04.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU	0,2	
05	Tersedianya masukan terhadap RUU Inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU		6.268.440,0
05.01	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU	0,4	
06	Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya		959.935,0
06.01	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya	0,2	
07	Terhimpunnya ASMASDA sebagai bahan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda		213.170,0
07.01	Nilai tertimbang ASMASDA yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda	0,4	
08	Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah		1.227.545,0
08.01	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan (Biro Persidangan I)	0,2	
09	Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah		2.716.571,0
09.01	Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah	0,2	
Total			65.373.370,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01	<i>Tersusunnya tabulasi data asmasda untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang</i>								
01.PBC	Kebijakan Bidang Politik								
01.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif	000 - Bukan Tematik
	051 - Telaah Aspirasi Masyarakat DAerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - PENETAPAN PRIORITAS PENGAWASAN ATAS ASMASDA PELAKSANAAN UU TERTENTU								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02	<i>Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang- undang</i>								
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
02.ABC.005	Rekomendasi Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK								000 - Bukan Tematik

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - Dukungan Keahlian dan Asistensi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Fit and Proper Test Pimppinan / Anggota BPK								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02.AEA	Koordinasi								
02.AEA.001	Laporan Materi Persidangan Lingkup Biro Persidangan I								000 - Bukan Tematik
	051 - Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan I								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02.AEA.002	Laporan Materi Persidangan Lingkup Biro Persidangan II								000 - Bukan Tematik

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi dan Persidangan dalam lingkup Biro Persidangan II								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02.AEA.003	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite I								000 - Bukan Tematik
	051 - Kunjungan Kerja								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02.AEA.004	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite II								000 - Bukan Tematik
	051 - Kunjungan Kerja								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02.AEA.005	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite III								000 - Bukan Tematik
	051 - Kunjungan Kerja								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
02.AEA.006	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite IV								000 - Bukan Tematik
	051 - Kunjungan Kerja								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
03	<i>Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah</i>								
03.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								
03.ABA.001	Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara								000 - Bukan Tematik
	051 - Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (IHPS BPK)								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	052 - Penyelenggaraan Penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD atas IHPS BPK								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
03.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
03.ABC.001	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I								000 - Bukan Tematik
	051 - Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan UU								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Daerah Persiapan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Penyusunan Hasil Pengawasan DPD tentang Kebijakan DAU tentang Dana Desa								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	055 - Penyusunan Laporan Kinerja Komite I								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
03.ABC.002	Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite II								000 - Bukan Tematik

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi Atas Pelaksanaan UU Tertentu								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Penyelenggaraan Penyusunan Hasil Pengawasan DPD Tentang Pelaksanaan UU Tertentu di Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Penyusunan Buku Laporan Kinerja Komite II								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
03.ABC.003	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite III								000 - Bukan Tematik
	051 - Kunjungan Kerja Inventarisasi Materi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Pelaksanaan Pengawasan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Pelaksanaan Pengawasan UU No.18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	055 - Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	056 - Penyusunan Laporan Kinerja Komite III								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
03.ABC.004	Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite IV								000 - Bukan Tematik
	051 - Inventarisasi Materi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Penyusunan Buku Laporan Kinerja Komite IV								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
03.ABC.012	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-undang								000 - Bukan Tematik
	051 - Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Rapat Konsolidasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Dukungan Keahlian Penyusunan Hasil Pengawasan UU di Komite DPD RI								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	055 - Finalisasi Materi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
04	<i>Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pemantauan dan peninjauan</i>								
04.PBC	Kebijakan Bidang Politik								
04.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda untuk Pemantauan dan Peninjauan				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif	000 - Bukan Tematik
	051 - Telaahan Asmasda								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	052 - Penetapan Prioritas Pengawasan atas Asmasda Pelaksanaan Undang- undang Tertentu								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
05	<i>Tersedianya masukan terhadap RUU Inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU</i>								
05.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
05.ABC.006	Rekomendasi Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								000 - Bukan Tematik
	051 - Penyusunan Program Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Evaluasi Hasil Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Perumusan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	055 - Konsultasi Publik								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	056 - Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	057 - Penyusunan Materi Kinerja BULD								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
05.ABC.008	Rekomendasi atas Pemantauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang								000 - Bukan Tematik
	051 - Perencanaan								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Pelaksanaan								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
05.ABC.010	Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								000 - Bukan Tematik
	051 - Menghadiri Kegiatan Seminar/Workshop atau Penyelesaian Dokumen terkait Tupoksi Pusperjakum DPD RI dengan Mitra Kerja								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	052 - Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Finalisasi Materi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	055 - Dukungan Litigasi bagi DPD RI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
06	<i>Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya</i>								
06.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
06.ABC.009	Rekomendasi atas hasil Peninjauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang								000 - Bukan Tematik

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - Pelaksanaan								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Penyusunan Rekomendasi Atas Hasil Peninjauan Pelaksanaan Undang Undang								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Penyusunan Laporan Kinerja PPUU								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
07	<i>Terhimpunnya ASMASDA sebagai bahan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda</i>								
07.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
07.ABC.011	Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								000 - Bukan Tematik
	051 - Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Finalisasi Materi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
08	<i>Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah</i>								
08.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
08.ABC.007	Rekomendasi atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah								000 - Bukan Tematik
	051 - Konsultasi Stakeholders Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Temu Konsultasi Legislasi Pusat-Daerah								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Perumusan								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Finalisasi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
09	<i>Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah</i>								
09.ABC	Kebijakan Bidang Politik								
09.ABC.013	Rekomendasi Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda								000 - Bukan Tematik
	051 - PEMUTAKHIRAN INFORMASI								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - TINJAUAN LAPANGAN								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	053 - Dialog publik								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	054 - Perumusan Materi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	055 - Diseminasi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	056 - Penyusunan komponen								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	057 - Finalisasi								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
09.AEA	Koordinasi								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
09.AEA.007	Laporan atas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								000 - Bukan Tematik
	051 - Koordinasi/Konsultasi/Rapat dengan Stakeholder dan SKPD								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
	052 - Dialog Daerah								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat						
Total									

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
01	Tersusunnya tabulasi data asmasda untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang				1.440.402,0				1.476.411,0	1.513.321,0
01.PBC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		1.440.402,0				1.476.411,0	1.513.321,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
01.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang	4	Rekomendasi Kebijakan		1.440.402,0	4	4	4	1.476.411,0	1.513.321,0	1.
01.PBC.001.051	Telaah Aspirasi Masyarakat DAerah	4,0	Rekomendasi Kebiajakn	304.826,8	1.219.307,0	4,0	4,0	4,0	1.249.789,0	1.281.034,0	1.
01.PBC.001.052	PENETAPAN PRIORITAS PENGAWASAN ATAS ASMASDA PELAKSANAAN UU TERTENTU	4,0	Rekomendasi Kebijakan	55.273,8	221.095,0	4,0	4,0	4,0	226.622,0	232.287,0	
02	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang				7.793.363,0				7.988.195,4	8.187.899,0	8.
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		168.350,0				172.558,0	176.871,0	
02.ABC.005	Rekomendasi Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK	1	Rekomendasi Kebijakan		168.350,0	1	1	1	172.558,0	176.871,0	
02.ABC.005.051	Dukungan Keahlian dan Asistensi	1,0	Rekomendasi Kebijakan	25.200,0	25.200,0	1,0	1,0	1,0	25.830,0	26.475,0	
02.ABC.005.052	Fit and Proper Test Pimppinan / Anggota BPK	1,0	Rekomendasi Kebijakan	143.150,0	143.150,0	1,0	1,0	1,0	146.728,0	150.396,0	
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		7.625.013,0				7.815.637,4	8.011.028,0	8.
02.AEA.001	Laporan Materi Persidangan Lingkup Biro Persidangan I	2	kegiatan		1.880.000,0	2	2	2	1.927.000,0	1.975.175,0	2.

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
02.AEA.001.051	Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan I	2,0	Kegiatan	940.000,0	1.880.000,0	2,0	2,0	2,0	1.927.000,0	1.975.175,0	2.
02.AEA.002	Laporan Materi Persidangan Lingkup Biro Persidangan II	2	kegiatan		1.880.000,0	2	2	2	1.927.000,0	1.975.175,0	2.
02.AEA.002.051	Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi dan Persidangan dalam lingkup Biro Persidangan II	2,0	Kegiatan	940.000,0	1.880.000,0	2,0	2,0	2,0	1.927.000,0	1.975.175,0	2.
02.AEA.003	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite I	8	kegiatan		1.171.355,0	8	8	8	1.200.638,9	1.230.654,8	1.
02.AEA.003.051	Kunjungan Kerja	8,0	Kegiatan	146.419,4	1.171.355,0	8,0	8,0	8,0	1.200.638,9	1.230.654,8	1.
02.AEA.004	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite II	5	kegiatan		1.139.911,0	5	5	5	1.168.408,0	1.197.618,0	1.
02.AEA.004.051	Kunjungan Kerja	5,0	Kegiatan	227.982,2	1.139.911,0	5,0	5,0	5,0	1.168.408,0	1.197.618,0	1.
02.AEA.005	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite III	8	kegiatan		502.659,0	8	8	8	515.225,5	528.106,1	
02.AEA.005.051	Kunjungan Kerja	8,0	Kegiatan	62.832,4	502.659,0	8,0	8,0	8,0	515.225,5	528.106,1	
02.AEA.006	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite IV	8	kegiatan		1.051.088,0	8	8	8	1.077.365,0	1.104.299,0	1.

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
02.AEA.006.051	Kunjungan Kerja	8,0	Kegiatan	131.386,0	1.051.088,0	8,0	8,0	8,0	1.077.365,0	1.104.299,0	1.
03	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah				43.826.143,0				44.736.107,6	45.663.123,9	46.
03.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rekomendasi Kebijakan		6.365.344,0				6.524.476,0	6.687.588,0	6.
03.ABA.001	Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	2	Rekomendasi Kebijakan		6.365.344,0	2	2	2	6.524.476,0	6.687.588,0	6.
03.ABA.001.051	Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (IHPS BPK)	2,0	Rekomendasi Kebijakan	796.666,0	1.593.332,0	2,0	2,0	0,0	1.633.165,0	1.673.994,0	1.
03.ABA.001.052	Penyelenggaraan Penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK	2,0	Rekomendasi Kebijakan	2.265.408,0	4.530.816,0	2,0	2,0	0,0	4.644.086,0	4.760.188,0	4.
03.ABA.001.053	Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD atas IHPS BPK	2,0	Rekomendasi Kebijakan	120.598,0	241.196,0	2,0	2,0	0,0	247.225,0	253.406,0	
03.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		37.460.799,0				38.211.631,6	38.975.535,9	39.
03.ABC.001	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I	6	Rekomendasi Kebijakan		15.143.877,0	6	6	6	15.336.789,8	15.531.824,6	15.

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
03.ABC.001.051	Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan UU	6,0	Rekomendasi	791.698,2	4.750.189,0	6,0	6,0	6,0	4.868.943,0	4.990.667,0	5.
03.ABC.001.052	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	6,0	Rekomendasi	476.818,3	2.860.910,0	6,0	6,0	6,0	2.932.432,8	3.005.743,6	3.
03.ABC.001.053	Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Daerah Persiapan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru	6,0	Materi	618.944,0	3.713.664,0	6,0	6,0	6,0	3.713.664,0	3.713.664,0	3.
03.ABC.001.054	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD tentang Kebijakan DAU tentang Dana Desa	6,0	Materi	618.944,0	3.713.664,0	6,0	6,0	6,0	3.713.664,0	3.713.664,0	3.
03.ABC.001.055	Penyusunan Laporan Kinerja Komite I	6,0	Laporan	17.575,0	105.450,0	6,0	6,0	6,0	108.086,0	108.086,0	
03.ABC.002	Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite II	5	Rekomendasi Kebijakan		11.190.658,0	5	5	5	11.470.423,0	11.757.183,0	12.
03.ABC.002.051	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi Atas Pelaksanaan UU Tertentu	5,0	Rekomendasi Kebijakan	909.757,8	4.548.789,0	5,0	5,0	5,0	4.662.508,0	4.779.071,0	4.
03.ABC.002.052	Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu	5,0	Rekomendasi Kebijakan	395.493,8	1.977.469,0	5,0	5,0	5,0	2.026.905,0	2.077.577,0	2.

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
03.ABC.002.053	Penyelenggaraan Penyusunan Hasil Pengawasan DPD Tentang Pelaksanaan UU Tertentu di Daerah	5,0	Rekomedasi Kebijakan	904.704,0	4.523.520,0	5,0	5,0	5,0	4.636.608,0	4.752.523,0	4.
03.ABC.002.054	Penyusunan Buku Laporan Kinerja Komite II	5,0	Rekomendasi Kebijakan	28.176,0	140.880,0	5,0	5,0	5,0	144.402,0	148.012,0	
03.ABC.003	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite III	3	Rekomendasi Kebijakan		7.317.675,0	3	3	3	7.500.616,9	7.688.132,3	7.
03.ABC.003.051	Kunjungan Kerja Inventarisasi Materi	3,0	Materi	239.054,3	717.163,0	3,0	3,0	3,0	735.092,1	753.469,4	
03.ABC.003.052	Pelaksanaan Pengawasan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	1,0	Kajian	2.398.736,0	2.398.736,0	1,0	1,0	1,0	2.458.704,4	2.520.172,0	2.
03.ABC.003.053	Pelaksanaan Pengawasan UU No.18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1,0	Kajian	2.628.240,0	2.628.240,0	1,0	1,0	1,0	2.693.946,0	2.761.294,7	2.
03.ABC.003.054	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	1,0	Rekomendasi	442.770,0	442.770,0	1,0	1,0	1,0	453.839,3	465.185,2	
03.ABC.003.055	Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	3,0	Rekomendasi	338.222,0	1.014.666,0	3,0	3,0	3,0	1.040.032,7	1.066.033,5	1.

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
03.ABC.003.056	Penyusunan Laporan Kinerja Komite III	1,0	Dokumen	116.100,0	116.100,0	1,0	1,0	1,0	119.002,5	121.977,6
03.ABC.004	Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite IV	4	Rekomendasi Kebijakan		3.120.220,0	5	5	5	3.198.225,0	3.278.180,0
03.ABC.004.051	Inventarisasi Materi	4,0	Rekomendasi Kebijakan	654.283,0	2.617.132,0	5,0	5,0	5,0	2.682.560,0	2.749.624,0
03.ABC.004.052	Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu	4,0	Rekomendasi Kebijakan	103.722,0	414.888,0	5,0	5,0	5,0	425.260,0	435.891,0
03.ABC.004.053	Penyusunan Buku Laporan Kinerja Komite IV	4,0	Rekomendasi Kebijakan	22.050,0	88.200,0	5,0	5,0	5,0	90.405,0	92.665,0
03.ABC.012	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-undang	4	Rekomendasi Kebijakan		688.369,0	8	8	8	705.577,0	720.216,0
03.ABC.012.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	4,0	Rekomendasi Kebijakan	63.405,0	253.620,0	8,0	8,0	8,0	259.960,0	266.459,0
03.ABC.012.052	Rapat Konsolidasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	4,0	Rekomendasi Kebijakan	70.950,0	283.800,0	8,0	8,0	8,0	290.895,0	298.167,0
03.ABC.012.053	Dukungan Keahlian Penyusunan Hasil Pengawasan UU di Komite DPD RI	4,0	Rekomendasi Kebijakan	22.677,3	90.709,0	8,0	8,0	8,0	92.976,0	95.301,0
03.ABC.012.054	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	4,0	Rekomendasi Kebijakan	12.630,0	50.520,0	8,0	8,0	8,0	51.783,0	50.077,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
03.ABC.012.055	Finalisasi Materi	4,0	Rekomendasi Kebijakan	2.430,0	9.720,0	8,0	8,0	8,0	9.963,0	10.212,0
04	Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pemantauan dan peninjauan				927.801,0				950.995,0	974.770,0
04.PBC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		927.801,0				950.995,0	974.770,0
04.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda untuk Pemantauan dan Peninjauan	1	Rekomendasi Kebijakan		927.801,0	1	1	1	950.995,0	974.770,0
04.PBC.002.051	Telaahan Asmasda	1,0	Rekomendasi Kebijakan	671.451,0	671.451,0	1,0	1,0	1,0	688.237,0	705.443,0
04.PBC.002.052	Penetapan Prioritas Pengawasan atas Asmasda Pelaksanaan Undang-undang Tertentu	1,0	Rekomendasi Kebijakan	256.350,0	256.350,0	1,0	1,0	1,0	262.758,0	269.327,0
05	Tersedianya masukan terhadap RUU Inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU				6.268.440,0				19.625.204,4	9.184.361,7
05.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		6.268.440,0				19.625.204,4	9.184.361,7
05.ABC.006	Rekomendasi Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	2	Rekomendasi Kebijakan		5.055.884,0	2	2	2	18.382.336,0	7.910.423,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
05.ABC.006.051	Penyusunan Program Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	2,0	Rekomendasi	466.323,0	932.646,0	2,0	2,0	2,0	955.962,0	979.861,0	1.
05.ABC.006.052	Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	1,0	Rekomendasi	1.430.901,0	1.430.901,0	1,0	1,0	1,0	14.666.730,0	1.503.340,0	1.
05.ABC.006.053	Evaluasi Hasil Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	1,0	Rekomendasi	274.820,0	274.820,0	1,0	1,0	1,0	281.690,0	2.887.320,0	
05.ABC.006.054	Perumusan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	2,0	Rekomendasi	115.560,0	231.120,0	2,0	2,0	2,0	236.898,0	242.820,0	
05.ABC.006.055	Konsultasi Publik	1,0	Rekomendasi	1.304.815,0	1.304.815,0	1,0	1,0	1,0	1.337.435,0	1.370.871,0	1.
05.ABC.006.056	Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	2,0	Rekomendasi	314.850,0	629.700,0	2,0	2,0	2,0	645.442,0	661.578,0	
05.ABC.006.057	Penyusunan Materi Kinerja BULD	1,0	Materi	251.882,0	251.882,0	1,0	1,0	1,0	258.179,0	264.633,0	
05.ABC.008	Rekomendasi atas Pemantauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang	1	Rekomendasi Kebijakan		756.696,0	1	1	1	775.613,4	795.003,7	
05.ABC.008.051	Perencanaan	1,0	Rekomendasi	384.630,0	384.630,0	1,0	1,0	1,0	394.245,8	404.101,9	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
05.ABC.008.052	Pelaksanaan	1,0	Rekomendasi	372.066,0	372.066,0	1,0	1,0	1,0	381.367,7	390.901,8
05.ABC.010	Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1	Rekomendasi Kebijakan		455.860,0	6	6	6	467.255,0	478.935,0
05.ABC.010.051	Menghadiri Kegiatan Seminar/Workshop atau Penyelesaian Dokumen terkait Tupoksi Pusperjakum DPD RI dengan Mitra Kerja	1,0	Rekomendasi Kebijakan	95.280,0	95.280,0	6,0	6,0	6,0	97.662,0	100.103,0
05.ABC.010.052	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	1,0	Rekomendasi Kebijakan	81.270,0	81.270,0	6,0	6,0	6,0	83.301,0	85.384,0
05.ABC.010.053	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	1,0	Rekomendasi Kebijakan	12.630,0	12.630,0	6,0	6,0	6,0	12.945,0	13.269,0
05.ABC.010.054	Finalisasi Materi	1,0	Rekomendasi Kebijakan	86.200,0	86.200,0	6,0	6,0	6,0	88.355,0	90.563,0
05.ABC.010.055	Dukungan Litigasi bagi DPD RI	1,0	Rekomendasi Kebijakan	180.480,0	180.480,0	6,0	6,0	6,0	184.992,0	189.616,0
06	Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya				959.935,0				983.933,4	1.008.541,7
06.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		959.935,0				983.933,4	1.008.541,7
06.ABC.009	Rekomendasi atas hasil Peninjauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang	1	Rekomendasi Kebijakan		959.935,0	1	1	1	983.933,4	1.008.541,7

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
06.ABC.009.051	Pelaksanaan	1,0	Rekomendasi	628.610,0	628.610,0	1,0	1,0	1,0	644.325,3	660.443,4
06.ABC.009.052	Penyusunan Rekomendasi Atas Hasil Peninjauan Pelaksanaan Undang Undang	1,0	Rekomendasi	314.400,0	314.400,0	1,0	1,0	1,0	322.260,0	330.316,5
06.ABC.009.053	Penyusunan Laporan Kinerja PPUU	1,0	Rekomendasi	16.925,0	16.925,0	1,0	1,0	1,0	17.348,1	17.781,8
07	Terhimpunnya ASMASDA sebagai bahan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda				213.170,0				218.498,0	223.960,0
07.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		213.170,0				218.498,0	223.960,0
07.ABC.011	Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peratusan Daerah dan Peraturan Daerah	1	Rekomendasi Kebijakan		213.170,0	2	2	2	218.498,0	223.960,0
07.ABC.011.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	1,0	Rekomendasi Kebijakan	87.840,0	87.840,0	1,0	1,0	1,0	90.036,0	92.286,0
07.ABC.011.052	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	1,0	Rekomendasi Kebijakan	12.630,0	12.630,0	1,0	1,0	1,0	12.945,0	13.269,0
07.ABC.011.053	Finalisasi Materi	1,0	Rekomendasi Kebijakan	112.700,0	112.700,0	1,0	1,0	1,0	115.517,0	118.405,0
08	Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah				1.227.545,0				1.258.232,0	1.289.687,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
08.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		1.227.545,0				1.258.232,0	1.289.687,0	1.
08.ABC.007	Rekomendasi atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah	1	Rekomendasi Kebijakan		1.227.545,0	1	1	1	1.258.232,0	1.289.687,0	1.
08.ABC.007.051	Konsultasi Stakeholders Daerah	1,0	Rekomendasi	37.992,0	37.992,0	1,0	1,0	1,0	38.941,0	39.915,0	
08.ABC.007.052	Temu Konsultasi Legislasi Pusat-Daerah	1,0	Rekomendasi	1.070.693,0	1.070.693,0	1,0	1,0	1,0	1.097.460,0	1.124.896,0	1.
08.ABC.007.053	Perumusan	1,0	Rekomendasi	109.860,0	109.860,0	1,0	1,0	1,0	112.606,0	115.421,0	
08.ABC.007.054	Finalisasi	1,0	Rekomendasi	9.000,0	9.000,0	1,0	1,0	1,0	9.225,0	9.455,0	
09	Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah				2.716.571,0				2.784.483,0	2.854.095,0	2.
09.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		2.716.571,0				2.784.483,0	2.854.095,0	2.
09.ABC.013	Rekomendasi Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda	1	Rekomendasi Kebijakan		2.716.571,0	1	1	1	2.784.483,0	2.854.095,0	2.
09.ABC.013.051	PEMUTAKHIRAN INFORMASI	1,0	Rekomendasi kebijakan	122.010,0	122.010,0	1,0	1,0	1,0	125.060,0	128.186,0	
09.ABC.013.052	TINJAUAN LAPANGAN	1,0	Rekomendasi kebijakan	445.138,0	445.138,0	1,0	1,0	1,0	456.266,0	467.673,0	
09.ABC.013.053	Dialog publik	1,0	Rekomendasi kebijakan	1.090.273,0	1.090.273,0	1,0	1,0	1,0	1.117.529,0	1.145.468,0	1.

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	
09.ABC.013.054	Perumusan Materi	2,0	Rekomendasi kebijakan	205.200,0	410.400,0	2,0	2,0	2,0	420.660,0	431.176,0	
09.ABC.013.055	Diseminasi	1,0	Rekommendasi kebijakan	175.400,0	175.400,0	1,0	1,0	1,0	179.785,0	184.279,0	
09.ABC.013.056	Penyusunan komponen	1,0	Rekoomendasi kebijakan	123.400,0	123.400,0	1,0	1,0	1,0	126.485,0	129.647,0	
09.ABC.013.057	Finalisasi	1,0	Rekomendasi kebijakan	349.950,0	349.950,0	1,0	1,0	1,0	358.698,0	367.666,0	
09.AEA	Koordinasi		kegiatan		0,0				0,0	0,0	
09.AEA.007	Laporan atas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	2	kegiatan		0,0	2	2	2	0,0	0,0	
09.AEA.007.051	Koordinasi/Konsultasi/Rapat dengan Stakeholder dan SKPD	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
09.AEA.007.052	Dialog Daerah	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
Total					65.373.370,0	-	-	-	80.022.059,8	70.899.759,3	69.

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tersusunnya tabulasi data asmasda untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang		1.440.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440.402,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.PBC	Kebijakan Bidang Politik		1.440.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440.402,0
01.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang		1.440.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440.402,0
01.PBC.001.051	Telaah Aspirasi Masyarakat DAerah	Utama	1.219.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.219.307,0
01.PBC.001.052	PENETAPAN PRIORITAS PENGAWASAN ATAS ASMASDA PELAKSANAAN UU TERTEUTU	Utama	221.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.095,0
02	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang		7.793.363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.793.363,0
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik		168.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168.350,0
02.ABC.005	Rekomendasi Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK		168.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168.350,0
02.ABC.005.051	Dukungan Keahlian dan Asistensi	Utama	25.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.200,0
02.ABC.005.052	Fit and Proper Test Pimppinan / Anggota BPK	Utama	143.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143.150,0
02.AEA	Koordinasi		7.625.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.625.013,0
02.AEA.001	Laporan Materi Persidangan Lingkup Biro Persidangan I		1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AEA.001.051	Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan I	Utama	1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0
02.AEA.002	Laporan Materi Persidangan Lingkup Biro Persidangan II		1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0
02.AEA.002.051	Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi dan Persidangan dalam lingkup Biro Persidangan II	Utama	1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0
02.AEA.003	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite I		1.171.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.171.355,0
02.AEA.003.051	Kunjungan Kerja	Utama	1.171.355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.171.355,0
02.AEA.004	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite II		1.139.911,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.139.911,0
02.AEA.004.051	Kunjungan Kerja	Utama	1.139.911,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.139.911,0
02.AEA.005	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite III		502.659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502.659,0
02.AEA.005.051	Kunjungan Kerja	Utama	502.659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502.659,0
02.AEA.006	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite IV		1.051.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.051.088,0
02.AEA.006.051	Kunjungan Kerja	Utama	1.051.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.051.088,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah		43.826.143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.826.143,0
03.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		6.365.344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.365.344,0
03.ABA.001	Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara		6.365.344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.365.344,0
03.ABA.001.051	Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (IHPS BPK)	Utama	1.593.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.593.332,0
03.ABA.001.052	Penyelenggaraan Penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK	Utama	4.530.816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.530.816,0
03.ABA.001.053	Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD atas IHPS BPK	Utama	241.196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241.196,0
03.ABC	Kebijakan Bidang Politik		37.460.799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.460.799,0
03.ABC.001	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I		15.143.877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.143.877,0
03.ABC.001.051	Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan UU	Utama	4.750.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.750.189,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.ABC.001.052	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	Utama	2.860.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.860.910,0
03.ABC.001.053	Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Daerah Persiapan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
03.ABC.001.054	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD tentang Kebijakan DAU tentang Dana Desa	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
03.ABC.001.055	Penyusunan Laporan Kinerja Komite I	Utama	105.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.450,0
03.ABC.002	Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite II		11.190.658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.190.658,0
03.ABC.002.051	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi Atas Pelaksanaan UU Tertentu	Utama	4.548.789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.548.789,0
03.ABC.002.052	Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu	Utama	1.977.469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.977.469,0
03.ABC.002.053	Penyelenggaraan Penyusunan Hasil Pengawasan DPD Tentang Pelaksanaan UU Tertentu di Daerah	Utama	4.523.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.523.520,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.ABC.002.054	Penyusunan Buku Laporan Kinerja Komite II	Utama	140.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.880,0
03.ABC.003	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite III		7.317.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.317.675,0
03.ABC.003.051	Kunjungan Kerja Inventarisasi Materi	Utama	717.163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717.163,0
03.ABC.003.052	Pelaksanaan Pengawasan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	Utama	2.398.736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.398.736,0
03.ABC.003.053	Pelaksanaan Pengawasan UU No.18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Utama	2.628.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.628.240,0
03.ABC.003.054	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	Utama	442.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442.770,0
03.ABC.003.055	Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	Utama	1.014.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.014.666,0
03.ABC.003.056	Penyusunan Laporan Kinerja Komite III	Utama	116.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116.100,0
03.ABC.004	Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Bidang Tugas Komite IV		3.120.220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.120.220,0
03.ABC.004.051	Inventarisasi Materi	Utama	2.617.132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.617.132,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.ABC.004.052	Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Tertentu	Utama	414.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414.888,0
03.ABC.004.053	Penyusunan Buku Laporan Kinerja Komite IV	Utama	88.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.200,0
03.ABC.012	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-undang		688.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688.369,0
03.ABC.012.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	Utama	253.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253.620,0
03.ABC.012.052	Rapat Konsolidasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Utama	283.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283.800,0
03.ABC.012.053	Dukungan Keahlian Penyusunan Hasil Pengawasan UU di Komite DPD RI	Utama	90.709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.709,0
03.ABC.012.054	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	Utama	50.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.520,0
03.ABC.012.055	Finalisasi Materi	Utama	9.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.720,0
04	Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pemantauan dan peninjauan		927.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.801,0
04.PBC	Kebijakan Bidang Politik		927.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.801,0
04.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda untuk Pemantauan dan Peninjauan		927.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.801,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.PBC.002.051	Telaahan Asmasda	Utama	671.451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671.451,0
04.PBC.002.052	Penetapan Prioritas Pengawasan atas Asmasda Pelaksanaan Undang-undang Tertentu	Utama	256.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256.350,0
05	Tersedianya masukan terhadap RUU Inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU		6.268.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.268.440,0
05.ABC	Kebijakan Bidang Politik		6.268.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.268.440,0
05.ABC.006	Rekomendasi Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah		5.055.884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.055.884,0
05.ABC.006.051	Penyusunan Program Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Utama	932.646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932.646,0
05.ABC.006.052	Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Utama	1.430.901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430.901,0
05.ABC.006.053	Evaluasi Hasil Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Utama	274.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274.820,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.ABC.006.054	Perumusan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Utama	231.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231.120,0
05.ABC.006.055	Konsultasi Publik	Utama	1.304.815,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.304.815,0
05.ABC.006.056	Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Utama	629.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629.700,0
05.ABC.006.057	Penyusunan Materi Kinerja BULD	Utama	251.882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251.882,0
05.ABC.008	Rekomendasi atas Pemantauan terhadap Pelaksanaan Undang- Undang		756.696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.696,0
05.ABC.008.051	Perencanaan	Utama	384.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384.630,0
05.ABC.008.052	Pelaksanaan	Utama	372.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372.066,0
05.ABC.010	Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		455.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455.860,0
05.ABC.010.051	Menghadiri Kegiatan Seminar/Workshop atau Penyelesaian Dokumen terkait Tupoksi Pusperjakum DPD RI dengan Mitra Kerja	Utama	95.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95.280,0
05.ABC.010.052	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	Utama	81.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.270,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.ABC.010.053	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	Utama	12.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.630,0
05.ABC.010.054	Finalisasi Materi	Utama	86.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86.200,0
05.ABC.010.055	Dukungan Litigasi bagi DPD RI	Utama	180.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.480,0
06	Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya		959.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959.935,0
06.ABC	Kebijakan Bidang Politik		959.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959.935,0
06.ABC.009	Rekomendasi atas hasil Peninjauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang		959.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959.935,0
06.ABC.009.051	Pelaksanaan	Utama	628.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628.610,0
06.ABC.009.052	Penyusunan Rekomendasi Atas Hasil Peninjauan Pelaksanaan Undang Undang	Utama	314.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.400,0
06.ABC.009.053	Penyusunan Laporan Kinerja PPUU	Utama	16.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.925,0
07	Terhimpunnya ASMASDA sebagai bahan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda		213.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.170,0
07.ABC	Kebijakan Bidang Politik		213.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.170,0
07.ABC.011	Rekomendasi Isu Strategis Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah		213.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.170,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
07.ABC.011.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	Utama	87.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87.840,0
07.ABC.011.052	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	Utama	12.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.630,0
07.ABC.011.053	Finalisasi Materi	Utama	112.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.700,0
08	Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah		1.227.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227.545,0
08.ABC	Kebijakan Bidang Politik		1.227.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227.545,0
08.ABC.007	Rekomendasi atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah		1.227.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227.545,0
08.ABC.007.051	Konsultasi Stakeholders Daerah	Utama	37.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.992,0
08.ABC.007.052	Temu Konsultasi Legislasi Pusat-Daerah	Utama	1.070.693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070.693,0
08.ABC.007.053	Perumusan	Utama	109.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.860,0
08.ABC.007.054	Finalisasi	Utama	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
09	Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah		2.716.571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.716.571,0
09.ABC	Kebijakan Bidang Politik		2.716.571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.716.571,0
09.ABC.013	Rekomendasi Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda		2.716.571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.716.571,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
09.ABC.013.051	PEMUTAKHIRAN INFORMASI	Utama	122.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122.010,0
09.ABC.013.052	TINJAUAN LAPANGAN	Utama	445.138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445.138,0
09.ABC.013.053	Dialog publik	Utama	1.090.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.090.273,0
09.ABC.013.054	Perumusan Materi	Utama	410.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410.400,0
09.ABC.013.055	Diseminasi	Utama	175.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.400,0
09.ABC.013.056	Penyusunan komponen	Utama	123.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123.400,0
09.ABC.013.057	Finalisasi	Utama	349.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349.950,0
09.AEA	Koordinasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA.007	Laporan atas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA.007.051	Koordinasi/Konsultasi/Rapat dengan Stakeholder dan SKPD	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA.007.052	Dialog Daerah	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			65.373.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.373.370,0

Jakarta, 26 Januari 2026

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. PROGRAM : CF - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
3. SASARAN PROGRAM :

01 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU

02 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

03 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya
4. KEGIATAN : 7983 - Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPD RI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :

03 - Biro Persidangan I

04 - Biro Persidangan II

06 - Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

08 - Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU		806.975.817,0
01.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU	12	
02	Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU		2.149.080,0
02.01	Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU	0,4	
03	Tersusunnya rumusan rancangan UU		60.387.407,0
03.01	Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU	1,6	
04	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pandangan dan pendapat		2.040.425,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
04.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat Atas Rancangan Undang-Undang Usul Pemerintah dan DPR	0,20	
05	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR		17.934.331,0
05.01	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR	0,40	
06	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU APBN		1.447.838,0
06.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN	0,2	
07	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU lainnya		618.500,0
07.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama	0,2	
08	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN		6.625.275,0
08.01	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN (Biro Persidangan II)	0,2	
09	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU lainnya		814.675,0
09.01	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama	0,2	
Total			898.993.348,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
01	<i>Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU</i>									
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik									
01.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah								000 - Bukan Tematik	
	051 - Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Penyusunan Materi dan Tindak Lanjut Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Penyusunan Medianusa									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
01.AEA	Koordinasi									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
01.AEA.001	Laporan Materi Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penerimaan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Daerah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Tindaklanjut Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
01.BMB	Komunikasi Publik									
01.BMB.001	Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses)								000 - Bukan Tematik	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	051 - Dukungan Kegiatan dan Perjalanan Dinas									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
01.BMB.002	Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD								000 - Bukan Tematik	
	051 - Dukungan Kegiatan dan Perjalanan Dinas									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
01.PBC	Kebijakan Bidang Politik									
01.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda dan Legislasi Rancangan Undang- undang				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif	000 - Bukan Tematik	
	051 - Pengolahan Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Focus Group Discussion									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Penyusunan Laporan Akhir									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Stakeholder Engagement									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
02	<i>Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU</i>									
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik									
02.ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi dan Rancangan Undang- undang DPD RI								000 - Bukan Tematik	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	051 - Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Finalisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Dukungan Keahlian Penyusunan Rancangan Undang- undang Usul/Prolegnas di Komite dan PPUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
02.ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Pandangan dan Pendapat Atas Rancangan Undang- undang dari Pemerintah dan DPR								000 - Bukan Tematik	
	051 - Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Peer Review Kajian Dengan Pakar/Ahli									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Finalisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
02.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan DPD RI Atas Rancangan Undang-undang Lainnya								000 - Bukan Tematik	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	051 - Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Finalisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
03	<i>Tersusunnya rumusan rancangan UU</i>									
03.AAA	Undang-Undang									
03.AAA.001	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite I								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Studi Banding RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Uji Sahih RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	055 - Finalisasi Draft RUU Usul DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
03.AAA.002	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite II								000 - Bukan Tematik	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	051 - Penyusunan Naskah Akademik Dan Drafting RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Studi Banding RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Uji Sahih RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	055 - Finalisasi Draft RUU Usul Inisiatif DPD RI									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
03.AAA.003	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite III								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Studi Banding RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Uji Sahih RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	055 - Finalisasi Draft RUU Usul Tugas Komite III DPD									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
03.AAA.004	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite IV								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Naskah Akademik Dan Drafting RUU usul Inisiatif DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Studi Banding RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Uji Sahih RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	055 - Finalisasi Draft RUU Usul Inisiatif DPD RI									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
03.AAA.005	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas PPUU								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Studi Banding RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Uji Sahih RUU									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	055 - Finalisasi Draft RUU Usul DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
03.AAA.006	KONSEP RUU								000 - Bukan Tematik	
	051 - Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Penetapan RUU Usul dari DPD RI									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
03.AAA.008	Rekomendasi Usul Prolegnas								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Naskah Akademik Prolegnas Usul DPD									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Pembahasan Bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja PPUU									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Kunjungan Kerja dalam rangka Inventarisasi Materi Usul Prolegnas DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Finalisasi Usul Prolegnas DPD RI									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
04	<i>Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pandangan dan pendapat</i>									
04.AAA	Undang-Undang									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
04.AAA.011	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite III DPD								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan RUU Hasil Pandangan/Pendapat bidang tugas Komite III									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Pembahasan bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Komite III									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Finalisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat bidang tugas Komite III									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
04.PBC	Kebijakan Bidang Politik									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
04.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang- undang Usul Pemerintah dan DPR				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif	000 - Bukan Tematik	
	051 - Pengolahan Data Asmasda									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Focus Group Discussion									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Penyusunan Laporan Akhir									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Stakeholder Engagement									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
05	<i>Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR</i>									
05.AAA	Undang-Undang									
05.AAA.009	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite I DPD								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Komite I									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	053 - Penyelenggaraan Penyusunan dan Pendapat DPD tentang penilaian persyaratan administratif Daerah Otonomi Baru (DOB)									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Penyelenggaraan Penyusunan dan Pendapat DPD tentang penilaian persyaratan dasar kewilayahan Daerah Otonomi Baru (DOB)									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	055 - Penyusunan Pendapat DPD tentang Pelaksanaan UU tentang Desa									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
05.AAA.010	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD								000 - Bukan Tematik	
	051 - Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Finalisasi Penyusunan Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Komite II									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	054 - Penyelenggaraan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tertentu dari DPR dan Pemerintah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
05.AAA.012	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite IV DPD								000 - Bukan Tematik	
	051 - Inventarisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Finalisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	053 - Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Komite IV									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
06	<i>Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU APBN</i>									
06.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan									
06.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Kerja Pemerintah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	052 - Finalisasi Draft Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Kerja Pemerintah									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
06.PBC	Kebijakan Bidang Politik									
06.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang- undang APBN				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif	000 - Bukan Tematik	
	051 - Sinkronisasi Data									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Focus Group Discussion									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Finalisasi									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
07	<i>Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU lainnya</i>									
07.PBC	Kebijakan Bidang Politik									
07.PBC.004	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang- undang Lainnya				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif	000 - Bukan Tematik	
	051 - Pengolahan Data Asmasda									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Focus Group Discussion									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	053 - Penyusunan Laporan Akhir									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	054 - Stakeholder Engagement									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
08	<i>Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN</i>									
08.AAA	Undang-Undang									
08.AAA.013	RUU APBN Hasil Pertimbangan DPD RI								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Penyelenggaraan Penyusunan Pertimbangan DPD tentang RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama									

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
09	<i>Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU lainnya</i>									
09.AAA	Undang-Undang									
09.AAA.007	RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite III								000 - Bukan Tematik	
	051 - Penyusunan Materi RUU Hasil Pertimbangan DPD RI									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Finalisasi Penyusunan RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
09.AAA.014	RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite IV								000 - Bukan Tematik	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 J PRESI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA							
	051 - Penyusunan Pertimbangan DPD RI ata RUU Pajak									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
	052 - Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Pajak									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat							
Total										

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
01	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU				806.975.817,0				814.485.224,0	834.897.453,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		4.642.434,0				4.658.423,0	4.665.381,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
01.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	17	Rekomendasi Kebijakan		4.642.434,0	20	20	20	4.658.423,0	4.665.381,0
01.ABC.001.051	Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	17,0	Rekomendasi Kebijakan	9.537,6	162.140,0	20,0	20,0	20,0	175.623,0	180.014,0
01.ABC.001.052	Penyusunan Materi dan Tindak Lanjut Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	12,0	Materi	365.007,8	4.380.094,0	12,0	12,0	12,0	4.380.095,0	4.380.095,0
01.ABC.001.053	Penyusunan Medianusa	17,0	Rekomendasi Kebijakan	5.894,1	100.200,0	20,0	20,0	20,0	102.705,0	105.272,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		6.080.000,0				6.384.000,0	6.703.200,0
01.AEA.001	Laporan Materi Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	1	kegiatan		6.080.000,0	39	39	39	6.384.000,0	6.703.200,0
01.AEA.001.051	Penerimaan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Daerah	1,0	Laporan	6.080.000,0	6.080.000,0	39,0	39,0	39,0	6.384.000,0	6.703.200,0
01.AEA.001.052	Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	0,0	Laporan	0,0	0,0	39,0	39,0	39,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
01.AEA.001.053	Tindaklanjut Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	0,0	Laporan	0,0	0,0	39,0	39,0	39,0	0,0	0,0
01.BMB	Komunikasi Publik		layanan/ konten		794.389.056,0				801.531.868,0	821.570.165,0
01.BMB.001	Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses)	5	layanan		558.181.980,0	5	5	5	558.601.689,0	572.566.732,0
01.BMB.001.051	Dukungan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	5,0	Layanan	111.636.396,0	558.181.980,0	5,0	5,0	586.439.942,0	558.601.689,0	572.566.732,0
01.BMB.002	Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD	7	layanan		236.207.076,0	7	7	7	242.930.179,0	249.003.433,0
01.BMB.002.051	Dukungan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	7,0	Layanan	33.743.868,0	236.207.076,0	7,0	7,0	7,0	242.930.179,0	249.003.433,0
01.PBC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		1.864.327,0				1.910.933,0	1.958.707,0
01.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda dan Legislasi Rancangan Undang- undang	5	Rekomendasi Kebijakan		1.864.327,0	5	5	5	1.910.933,0	1.958.707,0
01.PBC.001.051	Pengolahan Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah	5,0	Rekomendasi Kebijakan	21.940,0	109.700,0	5,0	5,0	5,0	112.442,0	115.253,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
01.PBC.001.052	Focus Group Disssussion	5,0	Rekomendasi Kebijakan	187.173,2	935.866,0	5,0	5,0	5,0	959.262,0	983.244,0
01.PBC.001.053	Penyusunan Laporan Akhir	5,0	Rekomendasi Kebijakan	154.485,0	772.425,0	5,0	5,0	5,0	791.735,0	811.529,0
01.PBC.001.054	Stakeholder Engagement	5,0	Rekomendasi Kebijakan	9.267,2	46.336,0	5,0	5,0	5,0	47.494,0	48.681,0
02	Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU				2.149.080,0				2.202.804,0	2.257.872,0
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		2.149.080,0				2.202.804,0	2.257.872,0
02.ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi dan Rancangan Undang- undang DPD RI	6	Rekomendasi Kebijakan		1.838.010,0	6	6	6	1.883.959,0	1.931.057,0
02.ABC.002.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	6,0	Rekomendasi Kebijakan	72.208,3	433.250,0	6,0	6,0	6,0	444.081,0	455.183,0
02.ABC.002.052	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	6,0	Rekomendasi Kebijakan	12.630,0	75.780,0	6,0	6,0	6,0	77.674,0	79.616,0
02.ABC.002.053	Finalisasi Materi	6,0	Rekomendasi Kebijakan	99.950,0	599.700,0	6,0	6,0	6,0	614.692,0	630.059,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
02.ABC.002.054	Dukungan Keahlian Penyusunan Rancangan Undang- undang Usul/Prolegnas di Komite dan PPUU	6,0	Rekomendasi Kebijakan	121.546,7	729.280,0	6,0	6,0	6,0	747.512,0	766.199,0
02.ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Pandangan dan Pendapat Atas Rancangan Undang- undang dari Pemerintah dan DPR	2	Rekomendasi Kebijakan		207.380,0	4	4	4	212.564,0	217.877,0
02.ABC.003.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	2,0	Rekomendasi Kebijakan	4.860,0	9.720,0	4,0	4,0	4,0	9.963,0	10.212,0
02.ABC.003.052	Peer Review Kajian Dengan Pakar/Ahli	2,0	Rekomendasi Kebijakan	12.630,0	25.260,0	4,0	4,0	4,0	25.891,0	26.538,0
02.ABC.003.053	Finalisasi Materi	2,0	Rekomendasi Kebijakan	86.200,0	172.400,0	4,0	4,0	4,0	176.710,0	181.127,0
02.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan DPD RI Atas Rancangan Undang-undang Lainnya	1	Rekomendasi Kebijakan		103.690,0	3	3	3	106.281,0	108.938,0
02.ABC.004.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	1,0	Rekomendasi Kebijakan	4.860,0	4.860,0	3,0	3,0	3,0	4.981,0	5.106,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
02.ABC.004.052	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	1,0	Rekomendasi Kebijakan	12.630,0	12.630,0	3,0	3,0	3,0	12.945,0	13.269,0
02.ABC.004.053	Finalisasi Materi	1,0	Rekomendasi Kebijakan	86.200,0	86.200,0	3,0	3,0	3,0	88.355,0	90.563,0
03	Tersusunnya rumusan rancangan UU				60.387.407,0				61.724.123,4	63.266.919,5
03.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		60.387.407,0				61.724.123,4	63.266.919,5
03.AAA.001	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite I	1	RUU		11.864.822,0	2	2	1	12.161.442,6	12.465.478,6
03.AAA.001.051	Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU	1,0	Dokumen	680.746,0	680.746,0	2,0	2,0	1,0	697.764,7	715.208,8
03.AAA.001.052	Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi	2,0	Laporan Kegiatan	367.457,5	734.915,0	4,0	4,0	2,0	753.287,9	772.120,1
03.AAA.001.053	Studi Banding RUU	2,0	Materi	4.599.467,5	9.198.935,0	4,0	4,0	2,0	9.428.908,4	9.664.631,1
03.AAA.001.054	Uji Sahih RUU	1,0	Materi	907.826,0	907.826,0	2,0	2,0	2,0	930.521,7	953.784,7
03.AAA.001.055	Finalisasi Draft RUU Usul DPD	1,0	Dokumen	342.400,0	342.400,0	1,0	1,0	1,0	350.960,0	359.734,0
03.AAA.002	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite II	1	RUU		11.864.822,0	2	2	1	12.161.440,0	12.465.177,0
03.AAA.002.051	Penyusunan Naskah Akademik Dan Drafting RUU	1,0	RUU	926.840,0	926.840,0	2,0	2,0	1,0	950.011,0	973.461,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
03.AAA.002.052	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi	1,0	RUU	1.327.010,0	1.327.010,0	2,0	2,0	1,0	1.360.185,0	1.394.189,0
03.AAA.002.053	Studi Banding RUU	1,0	RUU	7.633.857,0	7.633.857,0	2,0	2,0	1,0	7.824.703,0	8.020.321,0
03.AAA.002.054	Uji Sahih RUU	1,0	RUU	1.477.197,0	1.477.197,0	2,0	2,0	1,0	1.514.126,0	1.551.980,0
03.AAA.002.055	Finalisasi Draft RUU Usul Inisiatif DPD RI	1,0	RUU	499.918,0	499.918,0	2,0	2,0	1,0	512.415,0	525.226,0
03.AAA.003	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite III	1	RUU		11.864.822,0	2	2	2	12.161.441,9	12.465.478,6
03.AAA.003.051	Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU	1,0	Dokumen	855.988,0	855.988,0	2,0	2,0	2,0	877.387,0	899.322,4
03.AAA.003.052	Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi	3,0	Laporan	423.008,0	1.269.024,0	3,0	3,0	3,0	1.300.749,6	1.333.268,3
03.AAA.003.053	Studi Banding RUU	3,0	Laporan/ Materi	2.739.313,7	8.217.941,0	3,0	3,0	3,0	8.423.389,5	8.633.974,3
03.AAA.003.054	Uji Sahih RUU	1,0	Materi	1.021.121,0	1.021.121,0	2,0	2,0	2,0	1.046.649,0	1.072.815,3
03.AAA.003.055	Finalisasi Draft RUU Usul Tugas Komite III DPD	1,0	RUU	500.748,0	500.748,0	2,0	2,0	2,0	513.266,7	526.098,4
03.AAA.004	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite IV	1	RUU		11.864.822,0	2	2	1	11.988.477,0	12.288.190,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
03.AAA.004.051	Penyusunan Naskah Akademik Dan Drafting RUU usul Inisiatif DPD	1,0	RUU	989.265,0	989.265,0	2,0	2,0	1,0	1.013.996,0	1.039.346,0
03.AAA.004.052	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi RUU	1,0	RUU	914.428,0	914.428,0	2,0	2,0	1,0	939.159,0	962.638,0
03.AAA.004.053	Studi Banding RUU	1,0	RUU	8.692.256,0	8.692.256,0	2,0	2,0	1,0	8.716.987,0	8.934.912,0
03.AAA.004.054	Uji Sahih RUU	1,0	RUU	978.173,0	978.173,0	2,0	2,0	1,0	1.002.904,0	1.027.977,0
03.AAA.004.055	Finalisasi Draft RUU Usul Inisiatif DPD RI	1,0	RUU	290.700,0	290.700,0	2,0	2,0	1,0	315.431,0	323.317,0
03.AAA.005	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas PPUU	1	RUU		8.134.029,0	1	1	1	8.337.379,7	8.545.814,2
03.AAA.005.051	Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU	1,0	RUU	557.680,0	557.680,0	1,0	1,0	1,0	571.622,0	585.912,0
03.AAA.005.052	Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi	1,0	RUU	614.757,0	614.757,0	1,0	1,0	1,0	630.125,9	645.879,7
03.AAA.005.053	Studi Banding RUU	1,0	RUU	5.895.488,0	5.895.488,0	1,0	1,0	1,0	6.042.875,2	6.193.947,7
03.AAA.005.054	Uji Sahih RUU	1,0	RUU	751.704,0	751.704,0	1,0	1,0	1,0	770.496,6	789.759,0
03.AAA.005.055	Finalisasi Draft RUU Usul DPD	1,0	RUU	314.400,0	314.400,0	1,0	1,0	1,0	322.260,0	330.316,5
03.AAA.006	KONSEP RUU	4	RUU		3.035.680,0	4	4	4	3.111.572,0	3.189.361,2

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
03.AAA.006.051	Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU	4,0	UU	246.420,0	985.680,0	4,0	4,0	4,0	1.010.322,0	1.035.580,0
03.AAA.006.052	Penetapan RUU Usul dari DPD RI	4,0	RUU	512.500,0	2.050.000,0	4,0	4,0	4,0	2.101.250,0	2.153.781,0
03.AAA.008	Rekomendasi Usul Prolegnas	1	UU		1.758.410,0	1	1	1	1.802.370,3	1.847.419,5
03.AAA.008.051	Penyusunan Naskah Akademik Prolegnas Usul DPD	1,0	UU	482.970,0	482.970,0	1,0	1,0	1,0	495.044,3	507.420,4
03.AAA.008.052	Pembahasan Bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja PPUU	1,0	UU	44.009,0	44.009,0	1,0	1,0	1,0	45.109,2	46.237,0
03.AAA.008.053	Kunjungan Kerja dalam rangka Inventarisasi Materi Usul Prolegnas DPD	1,0	UU	917.031,0	917.031,0	1,0	1,0	1,0	939.956,8	963.445,7
03.AAA.008.054	Finalisasi Usul Prolegnas DPD RI	1,0	UU	314.400,0	314.400,0	1,0	1,0	1,0	322.260,0	330.316,5
04	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pandangan dan pendapat				2.040.425,0				2.091.434,6	2.143.719,5
04.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		1.280.425,0				1.312.435,6	1.345.246,5

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
04.AAA.011	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite III DPD	1	UU		1.280.425,0	2	2	2	1.312.435,6	1.345.246,5
04.AAA.011.051	Penyusunan RUU Hasil Pandangan/Pendapat bidang tugas Komite III	1,0	materi	199.002,0	199.002,0	2,0	2,0	2,0	203.977,1	209.076,5
04.AAA.011.052	Pembahasan bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Komite III	2,0	Materi	267.826,0	535.652,0	2,0	2,0	2,0	549.043,3	562.769,4
04.AAA.011.053	Finalisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat bidang tugas Komite III	1,0	RUU	545.771,0	545.771,0	2,0	2,0	2,0	559.415,3	573.400,7
04.PBC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		760.000,0				778.999,0	798.473,0
04.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang- undang Usul Pemerintah dan DPR	2	Rekomendasi Kebijakan		760.000,0	2	2	2	778.999,0	798.473,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
04.PBC.002.051	Pengolahan Data Asmasda	2,0	Rekomendasi Kebijakan	21.600,0	43.200,0	2,0	2,0	2,0	44.280,0	45.387,0
04.PBC.002.052	Focus Group Disssussion	2,0	Rekomendasi Kebijakan	190.126,0	380.252,0	2,0	2,0	2,0	389.758,0	399.502,0
04.PBC.002.053	Penyusunan Laporan Akhir	2,0	Rekomendasi Kebijakan	152.749,0	305.498,0	2,0	2,0	2,0	313.135,0	320.963,0
04.PBC.002.054	Stakeholder Engagement	2,0	Rekomendasi Kebijakan	15.525,0	31.050,0	2,0	2,0	2,0	31.826,0	32.621,0
05	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR				17.934.331,0				18.104.160,9	18.278.238,7
05.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		17.934.331,0				18.104.160,9	18.278.238,7
05.AAA.009	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite I DPD	1	UU		11.888.266,0	1	1	1	11.906.947,9	11.926.096,7
05.AAA.009.051	Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD	1,0	Materi	371.900,0	371.900,0	1,0	1,0	1,0	381.197,5	390.727,4
05.AAA.009.052	Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Komite I	2,0	Materi	187.687,0	375.374,0	2,0	2,0	2,0	384.758,4	394.377,3

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
05.AAA.009.053	Penyelenggaraan Penyusunan dan Pendapat DPD tentang penilaian persyaratan administratif Daerah Otonomi Baru (DOB)	11,0	Materi	337.605,8	3.713.664,0	11,0	11,0	11,0	3.713.664,0	3.713.664,0
05.AAA.009.054	Penyelenggaraan Penyusunan dan Pendapat DPD tentang penilaian persyaratan dasar kewilayahan Daerah Otonomi Baru (DOB)	11,0	Materi	337.605,8	3.713.664,0	11,0	11,0	11,0	3.713.664,0	3.713.664,0
05.AAA.009.055	Penyusunan Pendapat DPD tentang Pelaksanaan UU tentang Desa	11,0	Materi	337.605,8	3.713.664,0	11,0	11,0	11,0	3.713.664,0	3.713.664,0
05.AAA.010	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD	1	RUU		5.479.465,0	1	1	1	5.616.449,0	5.756.860,0
05.AAA.010.051	Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD	1,0	RUU	894.674,0	894.674,0	1,0	1,0	1,0	917.040,0	939.966,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
05.AAA.010.052	Finalisasi Penyusunan Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD	1,0	RUU	508.748,0	508.748,0	1,0	1,0	1,0	521.466,0	534.503,0
05.AAA.010.053	Pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Komite II	1,0	RUU	424.707,0	424.707,0	1,0	1,0	1,0	435.324,0	446.207,0
05.AAA.010.054	Penyelenggaraan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tertentu dari DPR dan Pemerintah	2,0	RUU	1.825.668,0	3.651.336,0	2,0	2,0	2,0	3.742.619,0	3.836.184,0
05.AAA.012	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite IV DPD	1	RUU		566.600,0	1	1	1	580.764,0	595.282,0
05.AAA.012.051	Inventarisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP	1,0	RUU	33.300,0	33.300,0	1,0	1,0	1,0	34.132,0	34.985,0
05.AAA.012.052	Finalisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP	1,0	RUU	33.300,0	33.300,0	1,0	1,0	1,0	34.132,0	34.985,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
05.AAA.012.053	Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Komite IV	1,0	RUU	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	512.500,0	525.312,0
06	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU APBN				1.447.838,0				1.484.032,0	1.521.133,0
06.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rekomendasi Kebijakan		520.037,0				533.037,0	546.363,0
06.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara	1	Rekomendasi Kebijakan		520.037,0	1	1	1	533.037,0	546.363,0
06.ABA.001.051	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Kerja Pemerintah	1,0	Rekomendasi Kebijakan	494.837,0	494.837,0	1,0	1,0	1,0	507.207,0	519.888,0
06.ABA.001.052	Finalisasi Draft Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Kerja Pemerintah	1,0	Rekomendasi Kebijakan	25.200,0	25.200,0	1,0	1,0	1,0	25.830,0	26.475,0
06.PBC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		927.801,0				950.995,0	974.770,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
06.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang- undang APBN	4	Rekomendasi Kebijakan		927.801,0	4	4	4	950.995,0	974.770,0
06.PBC.003.051	Sinkronisasi Data	4,0	Rekomendasi Kebijakan	67.595,3	270.381,0	4,0	4,0	4,0	277.140,0	284.069,0
06.PBC.003.052	Focus Group Discussion	4,0	Rekomendasi Kebijakan	75.095,0	300.380,0	4,0	4,0	4,0	307.889,0	315.586,0
06.PBC.003.053	Finalisasi	4,0	Rekomendasi Kebijakan	89.260,0	357.040,0	4,0	4,0	4,0	365.966,0	375.115,0
07	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU lainnya				618.500,0				633.995,0	649.846,0
07.PBC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan		618.500,0				633.995,0	649.846,0
07.PBC.004	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang- undang Lainnya	1	Rekomendasi Kebijakan		618.500,0	1	1	1	633.995,0	649.846,0
07.PBC.004.051	Pengolahan Data Asmasda	1,0	Rekomendasi Kebijakan	24.840,0	24.840,0	1,0	1,0	1,0	25.461,0	26.097,0
07.PBC.004.052	Focus Group Discussion	1,0	Rekomendasi Kebijakan	377.070,0	377.070,0	1,0	1,0	1,0	386.496,0	396.159,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
07.PBC.004.053	Penyusunan Laporan Akhir	1,0	Rekomendasi Kebijakan	177.240,0	177.240,0	1,0	1,0	1,0	181.705,0	186.248,0
07.PBC.004.054	Stakeholder Engagement	1,0	Rekomendasi Kebijakan	39.350,0	39.350,0	1,0	1,0	1,0	40.333,0	41.342,0
08	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN				6.625.275,0				6.790.906,0	6.960.678,0
08.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		6.625.275,0				6.790.906,0	6.960.678,0
08.AAA.013	RUU APBN Hasil Pertimbangan DPD RI	3	RUU		6.625.275,0	3	3	3	6.790.906,0	6.960.678,0
08.AAA.013.051	Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	3,0	RUU	698.033,0	2.094.099,0	3,0	3,0	3,0	2.146.451,0	2.200.112,0
08.AAA.013.052	Penyelenggaraan Penyusunan Pertimbangan DPD tentang RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama	3,0	RUU	1.510.392,0	4.531.176,0	3,0	3,0	3,0	4.644.455,0	4.760.566,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2027	2028	2029	2027	2028
09	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU lainnya				814.675,0				835.041,5	855.917,0
09.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		814.675,0				835.041,5	855.917,0
09.AAA.007	RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite III	1	UU		534.419,0	2	2	2	547.779,5	561.474,0
09.AAA.007.051	Penyusunan Materi RUU Hasil Pertimbangan DPD RI	1,0	Materi	166.547,0	166.547,0	2,0	2,0	2,0	170.710,7	174.978,4
09.AAA.007.052	Finalisasi Penyusunan RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI	1,0	RUU	367.872,0	367.872,0	2,0	2,0	2,0	377.068,8	386.495,5
09.AAA.014	RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite IV	1	RUU		280.256,0	1	1	1	287.262,0	294.443,0
09.AAA.014.051	Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Pajak	1,0	RUU	28.800,0	28.800,0	1,0	1,0	1,0	29.520,0	30.258,0
09.AAA.014.052	Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Pajak	1,0	RUU	251.456,0	251.456,0	1,0	1,0	1,0	257.742,0	264.185,0
Total					898.993.348,0	-	-	-	908.351.721,3	930.831.776,5

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU		806.975.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	806.975.817,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik		4.642.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.642.434,0
01.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah		4.642.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.642.434,0
01.ABC.001.051	Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Utama	162.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162.140,0
01.ABC.001.052	Penyusunan Materi dan Tindak Lanjut Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Utama	4.380.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.380.094,0
01.ABC.001.053	Penyusunan Medianusa	Utama	100.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.200,0
01.AEA	Koordinasi		6.080.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.080.000,0
01.AEA.001	Laporan Materi Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah		6.080.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.080.000,0
01.AEA.001.051	Penerimaan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Daerah	Utama	6.080.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.080.000,0
01.AEA.001.052	Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.053	Tindaklanjut Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BMB	Komunikasi Publik		794.389.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794.389.056,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMB.001	Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses)		558.181.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558.181.980,0
01.BMB.001.051	Dukungan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Utama	558.181.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558.181.980,0
01.BMB.002	Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD		236.207.076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.207.076,0
01.BMB.002.051	Dukungan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Utama	236.207.076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.207.076,0
01.PBC	Kebijakan Bidang Politik		1.864.327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.864.327,0
01.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda dan Legislasi Rancangan Undang- undang		1.864.327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.864.327,0
01.PBC.001.051	Pengolahan Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Utama	109.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.700,0
01.PBC.001.052	Focus Group Discussion	Utama	935.866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935.866,0
01.PBC.001.053	Penyusunan Laporan Akhir	Utama	772.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.425,0
01.PBC.001.054	Stakeholder Engagement	Utama	46.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.336,0
02	Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU		2.149.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.149.080,0
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik		2.149.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.149.080,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi dan Rancangan Undang-undang DPD RI		1.838.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.838.010,0
02.ABC.002.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	Utama	433.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433.250,0
02.ABC.002.052	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	Utama	75.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.780,0
02.ABC.002.053	Finalisasi Materi	Utama	599.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599.700,0
02.ABC.002.054	Dukungan Keahlian Penyusunan Rancangan Undang-undang Usul/Prolegnas di Komite dan PPUU	Utama	729.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729.280,0
02.ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Pandangan dan Pendapat Atas Rancangan Undang-undang dari Pemerintah dan DPR		207.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207.380,0
02.ABC.003.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	Utama	9.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.720,0
02.ABC.003.052	Peer Review Kajian Dengan Pakar/Ahli	Utama	25.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.260,0
02.ABC.003.053	Finalisasi Materi	Utama	172.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan DPD RI Atas Rancangan Undang-undang Lainnya		103.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103.690,0
02.ABC.004.051	Inventarisasi Materi/Pengumpulan Data/Studi Pendalaman	Utama	4.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860,0
02.ABC.004.052	Peer Review Kajian dengan Pakar/Ahli	Utama	12.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.630,0
02.ABC.004.053	Finalisasi Materi	Utama	86.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86.200,0
03	Tersusunnya rumusan rancangan UU		60.387.407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.387.407,0
03.AAA	Undang-Undang		60.387.407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.387.407,0
03.AAA.001	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite I		11.864.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.864.822,0
03.AAA.001.051	Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU	Utama	680.746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680.746,0
03.AAA.001.052	Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi	Utama	734.915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734.915,0
03.AAA.001.053	Studi Banding RUU	Utama	9.198.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.198.935,0
03.AAA.001.054	Uji Sahih RUU	Utama	907.826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907.826,0
03.AAA.001.055	Finalisasi Draft RUU Usul DPD	Utama	342.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342.400,0
03.AAA.002	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite II		11.864.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.864.822,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AAA.002.051	Penyusunan Naskah Akademik Dan Drafting RUU	Utama	926.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	926.840,0
03.AAA.002.052	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi	Utama	1.327.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.327.010,0
03.AAA.002.053	Studi Banding RUU	Utama	7.633.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.633.857,0
03.AAA.002.054	Uji Sahih RUU	Utama	1.477.197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.477.197,0
03.AAA.002.055	Finalisasi Draft RUU Usul Inisiatif DPD RI	Utama	499.918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.918,0
03.AAA.003	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite III		11.864.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.864.822,0
03.AAA.003.051	Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU	Utama	855.988,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855.988,0
03.AAA.003.052	Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi	Utama	1.269.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.269.024,0
03.AAA.003.053	Studi Banding RUU	Utama	8.217.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.217.941,0
03.AAA.003.054	Uji Sahih RUU	Utama	1.021.121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.021.121,0
03.AAA.003.055	Finalisasi Draft RUU Usul Tugas Komite III DPD	Utama	500.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.748,0
03.AAA.004	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite IV		11.864.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.864.822,0
03.AAA.004.051	Penyusunan Naskah Akademik Dan Drafting RUU usul Inisiatif DPD	Utama	989.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	989.265,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AAA.004.052	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Inventarisasi Materi RUU	Utama	914.428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914.428,0
03.AAA.004.053	Studi Banding RUU	Utama	8.692.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.692.256,0
03.AAA.004.054	Uji Sahih RUU	Utama	978.173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	978.173,0
03.AAA.004.055	Finalisasi Draft RUU Usul Inisiatif DPD RI	Utama	290.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290.700,0
03.AAA.005	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas PPUU		8.134.029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.134.029,0
03.AAA.005.051	Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting RUU	Utama	557.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557.680,0
03.AAA.005.052	Kunjungan kerja dalam rangka Inventarisasi Materi	Utama	614.757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614.757,0
03.AAA.005.053	Studi Banding RUU	Utama	5.895.488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.895.488,0
03.AAA.005.054	Uji Sahih RUU	Utama	751.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751.704,0
03.AAA.005.055	Finalisasi Draft RUU Usul DPD	Utama	314.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.400,0
03.AAA.006	KONSEP RUU		3.035.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.035.680,0
03.AAA.006.051	Harmonisasi Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU	Utama	985.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985.680,0
03.AAA.006.052	Penetapan RUU Usul dari DPD RI	Utama	2.050.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.000,0
03.AAA.008	Rekomendasi Usul Prolegnas		1.758.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.758.410,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AAA.008.051	Penyusunan Naskah Akademik Prolegnas Usul DPD	Utama	482.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482.970,0
03.AAA.008.052	Pembahasan Bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja PPUU	Utama	44.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.009,0
03.AAA.008.053	Kunjungan Kerja dalam rangka Inventarisasi Materi Usul Prolegnas DPD	Utama	917.031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917.031,0
03.AAA.008.054	Finalisasi Usul Prolegnas DPD RI	Utama	314.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.400,0
04	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pandangan dan pendapat		2.040.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.040.425,0
04.AAA	Undang-Undang		1.280.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280.425,0
04.AAA.011	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite III DPD		1.280.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280.425,0
04.AAA.011.051	Penyusunan RUU Hasil Pandangan/Pendapat bidang tugas Komite III	Utama	199.002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199.002,0
04.AAA.011.052	Pembahasan bersama DPR Dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Komite III	Utama	535.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535.652,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.AAA.011.053	Finalisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat bidang tugas Komite III	Utama	545.771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545.771,0
04.PBC	Kebijakan Bidang Politik		760.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760.000,0
04.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-undang Usul Pemerintah dan DPR		760.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760.000,0
04.PBC.002.051	Pengolahan Data Asmasda	Utama	43.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.200,0
04.PBC.002.052	Focus Group Disssussion	Utama	380.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380.252,0
04.PBC.002.053	Penyusunan Laporan Akhir	Utama	305.498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305.498,0
04.PBC.002.054	Stakeholder Engagement	Utama	31.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.050,0
05	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR		17.934.331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.934.331,0
05.AAA	Undang-Undang		17.934.331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.934.331,0
05.AAA.009	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite I DPD		11.888.266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.888.266,0
05.AAA.009.051	Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD	Utama	371.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AAA.009.052	Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) lingkup kerja Komite I	Utama	375.374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375.374,0
05.AAA.009.053	Penyelenggaraan Penyusunan dan Pendapat DPD tentang penilaian persyaratan administratif Daerah Otonomi Baru (DOB)	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
05.AAA.009.054	Penyelenggaraan Penyusunan dan Pendapat DPD tentang penilaian persyaratan dasar kewilayahan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
05.AAA.009.055	Penyusunan Pendapat DPD tentang Pelaksanaan UU tentang Desa	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
05.AAA.010	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD		5.479.465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.479.465,0
05.AAA.010.051	Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD	Utama	894.674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	894.674,0
05.AAA.010.052	Finalisasi Penyusunan Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II DPD	Utama	508.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508.748,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AAA.010.053	Pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Komite II	Utama	424.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424.707,0
05.AAA.010.054	Penyelenggaraan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tertentu dari DPR dan Pemerintah	Utama	3.651.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.651.336,0
05.AAA.012	RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite IV DPD		566.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566.600,0
05.AAA.012.051	Inventarisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP	Utama	33.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.300,0
05.AAA.012.052	Finalisasi Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP	Utama	33.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.300,0
05.AAA.012.053	Pembahasan Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) Lingkup Kerja Komite IV	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU APBN		1.447.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.447.838,0
06.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		520.037,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520.037,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
06.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara		520.037,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520.037,0
06.ABA.001.051	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Kerja Pemerintah	Utama	494.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494.837,0
06.ABA.001.052	Finalisasi Draft Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Kerja Pemerintah	Utama	25.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.200,0
06.PBC	Kebijakan Bidang Politik		927.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.801,0
06.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang-undang APBN		927.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.801,0
06.PBC.003.051	Sinkronisasi Data	Utama	270.381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.381,0
06.PBC.003.052	Focus Group Discussion	Utama	300.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.380,0
06.PBC.003.053	Finalisasi	Utama	357.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357.040,0
07	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU lainnya		618.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618.500,0
07.PBC	Kebijakan Bidang Politik		618.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
07.PBC.004	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang-undang Lainnya		618.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618.500,0
07.PBC.004.051	Pengolahan Data Asmasda	Utama	24.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.840,0
07.PBC.004.052	Focus Group Discussion	Utama	377.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377.070,0
07.PBC.004.053	Penyusunan Laporan Akhir	Utama	177.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177.240,0
07.PBC.004.054	Stakeholder Engagement	Utama	39.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.350,0
08	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN		6.625.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.625.275,0
08.AAA	Undang-Undang		6.625.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.625.275,0
08.AAA.013	RUU APBN Hasil Pertimbangan DPD RI		6.625.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.625.275,0
08.AAA.013.051	Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Non APBN/APBNP dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	Utama	2.094.099,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.094.099,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
08.AAA.013.052	Penyelenggaraan Penyusunan Pertimbangan DPD tentang RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama	Utama	4.531.176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.531.176,0
09	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU lainnya		814.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814.675,0
09.AAA	Undang-Undang		814.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814.675,0
09.AAA.007	RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite III		534.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534.419,0
09.AAA.007.051	Penyusunan Materi RUU Hasil Pertimbangan DPD RI	Utama	166.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166.547,0
09.AAA.007.052	Finalisasi Penyusunan RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI	Utama	367.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367.872,0
09.AAA.014	RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite IV		280.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280.256,0
09.AAA.014.051	Penyusunan Pertimbangan DPD RI ata RUU Pajak	Utama	28.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.800,0
09.AAA.014.052	Finalisasi Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU Pajak	Utama	251.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251.456,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
Total			898.993.348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898.993.348,0

Jakarta, 26 Januari 2026